APLINDO

Maju Bersama Membangun Bangsa

BULETIN APLINDO

Edisi Maret 2022

Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia

Komplek Perkantoran Graha Kencana Blok GK L.t 6-C
Jl. Raya Pejuangan no. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Telp. 021.535 9050

Email : aplindo71@gmail.com

Website : www.aplindo.web.id

DAFTAR ISI

No		Keterangan	Halaman
I	Laporan Kegiatan Bulan Maret 2022		
	1	Rapat Persiapan Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah	3
	2	Rapat finalisasi Persiapan Webinar Foundry 4.0	3
	3	Konferensi Pers KADIN "Posisi KADIN Indonesia akan rencana pemerintah menaikkan PPN".	4
	4	Rakernas Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan	5
	5	Seminar "Hidrogen untuk Industri: tantangan dan peluang dalam mendukung kemandirian sektor industri"	6
	6	Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	7
	7	FGD Tuntutan Standardisasi dan Produktivitas Bagi Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional di Era Globalisasi	9
II	Berita atau Artikel		
	1	Gunakan Produk Dalam Negeri untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional	11
	2	Presiden Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Indonesia	12
	3	Sukses Konversi 100 Motor Listrik, Kementerian ESDM Lanjutkan Konversi 1.000 Motor Listrik Tahun 2022	13
	4	Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Jadi Juli 2022	13
III	Perkembangan Ekspor Impor Indonesia		16
IV	Casting Production 2020		18
V	Data Kendaraan Bermotor		
	1	Data Kendaraan Bermotor Roda 4 Di Indonesia	20
	2	Data Kendaraan Bermotor Roda 4 Di ASEAN	21
	3	Data Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Indonesia	21
	4	Data Kendaraan Bermotor Roda 2 Di ASEAN	22
	5	Data Produksi Alat Berat, Kontruksi dan Pertambangan	22
VI	Informasi Umum		
	1	Website Pemerintah Yang Dapat Diakses	23
	2	Website Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia	23
	3	Website Himpunan Ahli Pengecoran Logam Indonesia	23
VII	Pameran dan Seminar		24
VIII	Penutup		28

LAPORAN KEGIATAN APLINDO BULAN MARET 2022

1. Pada tanggal 11 Maret 2022, APLINDO menghadiri Undangan Rapat virtual Persiapan Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah.

Dalam rangka pelasanaan Undang-undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan pengusaha untuk menyusun dan menerapkan Struktur Dan Skala Upah, Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Struktur dan Skala Upah dari asosiasi dibawah keanggotaan KADIN.

Landasan kebijakan Struktur Dan Skala Upah (SUSU):

1. Pekerja/buruh cenderung memaknai UM sebagai upah yang dapat menyejahterakan pekerja/buruh dan keluarganya sehingga menginginkan UM ditetapkan dengan nilai yang tinggi.
2. Pengusaha cenderung memberlakukan UM sebagai standar upah yang berlaku di perusahaan, sehingga UM diberlakukan bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan tanpa mempertimbangkan jabatan.

Kondisi ini tidak akan terjadi jika perusahaan menerapkan sistem pengupahan yang adil dan layak melalui struktur Dan Skala Upah.

Langkah strategis pemerintah:

1. Mendorong forum-forum dialog dengan perusahaan skala nasional beserta rantai pasoknya
2. Sosialisasi struktur dan skala upah kepada stakeholder baik secara daring maupun luring
3. Bimtek penyusunan struktur dan skala upah manager HRD di perusahaan
4. Membangun sistem pengawasan penerapan struktur dan skala upah
5. Melaksanakan olimpiade pengupahan berbasis produktivitas sebagai wadah kompetisi kosep gagasan yang telah diimplementasikan di perusahaan.

APLINDO telah menghimbau kepada anggota yang berminat dalam kegiatan Bimtek SUSU ini agar segera mendaftarkan ke sekretariat APLINDO dengan mengirimkan nama perusahaan, alamat perusahaan, nama peserta (maksimal 1 orang), dan No. Handphone.

Kegiatan Bimtek ini tidak dipungut biaya, akomodasi dan penginapan ditanggung oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I, kecuali transportasi. Waktu pelaksanaan kegiatan bimtek ini akan dijadwalkan dan diinformasikan ke perusahaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

2. Pada tanggal 15 Maret 2022, APLINDO menghadiri rapat virtual finalisasi acara Webinar Foundry 4.0 bersama dengan PPI, Makmur Meta Graha Dinamika, Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia, RGU Asia.

Agenda Webinar Foundry 4.0

19 April 2022

10.00 – 10.05	Welcome and introduction by PPI	15 min
10.05 - 10.10	Opening Remarks by Chairman of APLINDO	

10.10 - 10.15	Opening and Speaker Introduction by Moderator (APLINDO)	
10.15 – 10.55	Presentation from **RGU Asia Pte Ltd.**	40 min
10.55 – 11.35	Presentation from **PT. Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia**	40 min
11.35 - 11.50	Q&A session	15 min
11.50 – 12.00	Conclusion and wrap up	10 min

Ayo segera daftarkan diri anda di link berikut **https://bit.ly/Webinar_Foundry4_0**.

3. Pada tanggal 15 Maret 2022, APLINDO menghadiri Konferensi Pers KADIN "Posisi KADIN Indonesia akan rencana pemerintah menaikkan PPN".

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan KADIN mendukung rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Rencana kenaikan ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

upaya tersebut sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk membantu masyarakat mewujudkan sistem perpajakan yang adil, sehat, akuntabel, dan sederhana, yang diharapkan mampu menjadi pondasi dan instrumen untuk mencapai kepatuhan pajak sukarela yang optimal.

1. Membantu tingkatkan penerimaan negara

Ketua KADIN Arsjad Rasjid dalam acara Penandatanganan MoU KPK dan KADIN mengatakan kenaikan tarif PPN merupakan upaya pemerintah untuk membantu

meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke angka maksimal 3 persen di 2023. Hal ini mencerminkan dukungan masyarakat dan semangat gotong royong untuk membiayai pembangunan dan pemulihan ekonomi yang lebih merata dan adil.

Terkait inflasi, Arsjad menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok belakangan, tidak disebabkan oleh kenaikan PPN. Menurutnya, kenaikan bahan pokok ini lebih disebabkan oleh situasi dunia politik yang tidak stabil dimana terdapat konflik antara Rusia dan Ukraina, yang menyebabkan instabilitas perdagangan global.

Di sisi lain, ada tantangan logistik dunia akibat terganggunya sistem rantai pasok selama pandemik, yang juga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga angkutan logistik yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku.

2. Pembebasan tarif PPN pada sejumlah barang dan jasa

KADIN mengharapkan sejumlah barang dan jasa untuk tetap mendapatkan pembebasan PPN.

"KADIN Indonesia merekomendasikan agar seluruh barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, dan aktivitas ekonomi strategis lainnya tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsjad berharap agar upaya pemerintah untuk mengenakan PPN Final dengan tarif rendah dan administrasi yang sederhana di UU HPP segera dilaksanakan untuk dapat membantu pelaku usaha, khususnya UMKM. Terlebih dengan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) UMKM sebesar Rp500 juta setahun.

3. Program perlindungan sosial

saat ini pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok bahan pangan sangat perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan ditingkat konsumen agar stabilitas harga pangan tetap terjaga. Ia pun menyebut KADIN berharap seiring penerapan kebijakan tarif PPN 11 persen pada 1 April 2022, pemerintah secara bersamaan dapat memperkuat program perlindungan sosial karena situasi bulan puasa dan lebaran yang memerlukan dukungan agar harga-harga kebutuhan masyarakat lebih terjangkau.

KADIN juga mengusulkan agar dapat diberikan fasilitas PPN DTP (Ditanggung Pemerintah), terutama untuk barang kebutuhan pokok yang belum mendapat fasilitas, seperti minyak goreng dan gula pasir. Arsjad juga menyebut KADIN Indonesia menilai bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk tambahan nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang kurang mampu masih diperlukan selama inflasi global ini berlangsung.

"Di saat yang sama, KADIN Indonesia juga mengajak seluruh anggota untuk berkomitmen tidak menaikkan harga barang dan jasa pada saat kenaikan tarif PPN ini, dan turut membantu pemerintah dan masyarakat agar di pasar tetap tersedia barang dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik," pungkas Arsjad.

4. Pada tanggal 16 Maret 2022, APLINDO menghadiri Rakernas KADIN Indonesia bidang Ketenagakerjaan yang diadakan secara virtual.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Ketenagakerjaan memiliki dua agenda penting yang akan dikemukakan dalam rapat kerja nasional.

Pertama, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Agenda lainnya yaitu penguatan program kerja di bidang ketenagakerjaan antara Kadin Indonesia dan provinsi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyampaikan dalam sambutannya bahwa Kadin akan terus berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.

Lengkapnya, Adi menjelaskan terdapat 10 MoU yang terdiri diperuntukkan untuk membangun kemitraan yang strategis. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kadin, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta para presiden dari serikat pekerja.

Kadin melalui Rumah Ketenagakerjaan Nasional (RKN) akan mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif serta meningkatkan daya saing. Adi juga sempat menyinggung bahwa akan ada fasilitas perumahan bagi pengusaha. "Serta memfasilitasi penyediaan kawasan perumahan, tentu nanti kita diskusikan mekanismenya," kata Adi. Adi berharap dengan terbentuknya RKN akan menjadi penguatan dan kolaborasi dengan kabupaten besar dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Rakernas Ketenagakerjaan 2022 ini merupakan langkah konkret KADIN Indonesia dalam menjembatani komunikasi tripartit; pengusaha, pekerja, dan pemerintah melalui rumusan program kerja. Ini juga bentuk lanjutan dari pertemuan awal tahun sebelumnya antara KADIN dengan serikat-serikat pekerja dalam rangka mencetak pekerja yang kompeten, profesional, kredibel, berkarakter kuat sekaligus yang paling utama, harus sejahtera," ujar Arsjad.

Salah satu strategi KADIN melalui Program Rumah Ketenagakerjaan Nasional sebagai payung dari semua program kerja yang dirumuskan KADIN Indonesia bersama pemerintah dan organisasi serikat pekerja mitra. Rumah Ketenagakerjaan Nasional merupakan innovation hub untuk merumuskan peta jalan ketenagakerjaan nasional untuk kesejahteraan dan keunggulan SDM nasional.

Sebelumnya, KADIN Indonesia bersama serikat pekerja sepakat untuk membentuk kelompok kerja atau Pokja yang secara khusus membahas kesejahteraan buruh hingga 2045. Kesepakatan itu sekaligus membentuk wadah komunikasi antara KADIN Indonesia dan serikat pekerja bernama Rumah Ketenagakerjaan KADIN Nasional.

5. Pada tanggal 29 Maret 2022, APLINDO menghadiri Seminar "Hidrogen untuk Industri: tantangan dan peluang dalam mendukung kemandirian sektor industri" yang diadakan secara hybrid.

Seminar ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesiapan industri dalam penggunaan hidrogen sebagai energy factor transition. Selain itu, dapat diidentifikasi pula tantangan dan peluang pengembangan hidrogen dalam mendukung kemandirian sektor industri. Sehingga hasil seminar ini dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal ILMATE dalam penyiapan kebijakan yang mendukung pemanfaatan hidrogen sebagai energi baru dan pengembangan industri berbasis clean energy yang akan memperkuat neraca komoditas di sektor ILMATE.

Melihat ketersedian energi nasional, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020 – 2024 dinyatakan bahwa persediaan energi domestik pada tahun 2030 diperkirakan hanya mampu memenuhi 75% permintaan energi nasional, dan akan terus menurun hingga hanya sekitar 28% pada tahun 2045. Dengan demikian, terjadi potensi kekurangan supply energi di masa depan yang akan membahayakan ketahanan energi nasional yang secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan energi sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong di sektor Industri dan juga mempengaruhi stabilitas

neraca komoditas sektor ILMATE. Untuk itu, upaya – upaya diversifikasi energi mutlak diperlukan.

Dengan kondisi keterbatasan energi fosil di masa depan, maka perlu diupayakan untuk pemenuhan sumber energi baru yang memadai dan andal yang akan memberikan multiplier effect yang luar biasa yang akan mendukung daya saing industri, menarik minat investasi, dan tumbuhnya industri dalam negeri.

Hidrogen, salah satu sumber energi baru, dapat menjadi pilihan untuk menggantikan energi fosil dan batubara di masa depan dan menjadi kunci pengembangan energi masa depan. Hal ini didukung karena hidrogen sebagai pembawa energi (energy carrier / energy factor transition) yang dapat digunakan untuk menyimpan, memindahkan, dan menyalurkan energi yang dihasilkan dari sumber lain.

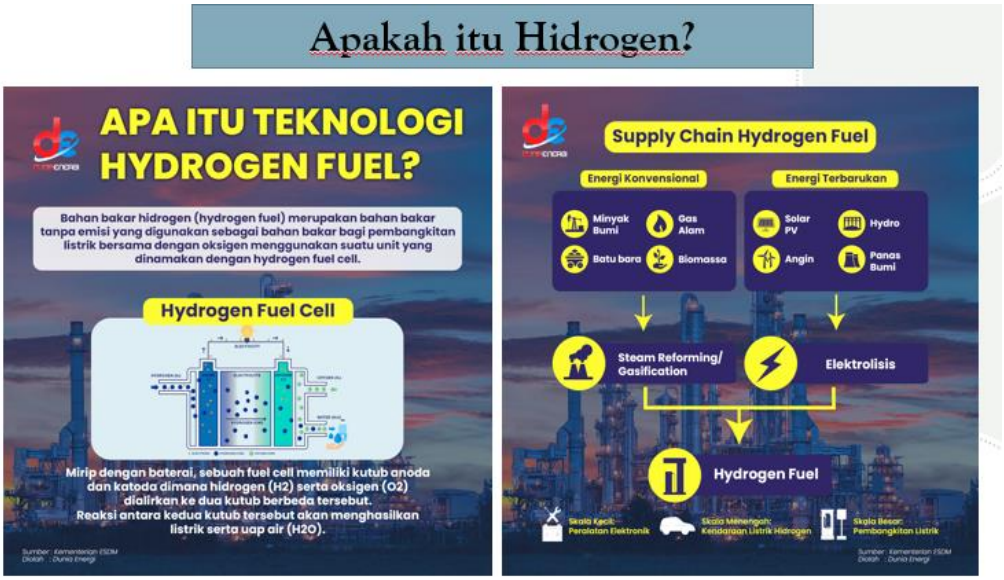

6. Pada tanggal 30 Maret 2022, APLINDO menghadiri undangan sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PAJAK PENGHASILAN

1. Orang Pribadi UMK

Wajib Pajak orang pribadi UMK tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta rupiah dalam satu tahun pajak

2. Tarif PPh Orang Pribadi

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan Orang Pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – **Rp60 juta**	5%
II	> Rp50 juta – 250 juta	15%	**> Rp60 juta** – 250 juta	15%
III	> 250 juta – 500 juta	25%	> 250 juta – 500 juta	25%
IV	> Rp 500 juta	30%	> Rp 500 juta – 5 miliar	30%
V			**> Rp 5 miliar**	**35%**

Sumber: Kemenkeu

3. Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan tetap menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya

Tarif PPh Badan		
Tahun Pajak	**UU PPh**	**UU HPP**
Tahun 2020-2021	22%	22%
Tahun 2022 dst	20%	**22 %**

Perbandingan Rata-rata Tarif PPh Badan					
Keterangan	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Rata-rata OECD (%)	23,95	23,53	23,12	22,88	22,81
Rata-rata Amerika (%)	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16
Rata-rata G-20	25,92	25,29	24,90	24,60	24,17
Rata-rata ASEAN	22,67	22,67	22,67	22,17	22,17

- Untuk menciptakan APBN yang adil dan sehat, perlu mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Ps 31E.
- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.
- Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan, Pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh Badan Tahun Pajak 2022 sebesar 22%.

Sumber: Kemenkeu

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Harmonisasi: Objek PPN dan Fasilitas PPN; UU PPN dan UU HKPD

- Tujuan: Optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
- a.l. menjadikan barang kebutuhan pokok sebagai BKP dan jasa pendidikan sebagai JKP tetapi diiringi dengan ruang pemberian fasilitas untuk BKP/JKP tersebut: untuk keadilan dan fasilitas yang tepat sasaran, dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

2. Tarif PPN serta Kemudahan & Kesederhanaan PPN

a. Tarif Umum

UU PPN		UU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

b. Tarif Khusus

- DPP Nilai Lain:
- Besaran Tertentu

Sumber: Kemenkeu

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

1. Bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.
2. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, melalui:
   a. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
   b. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020.
3. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022)
4. Terdiri dari 2 Kebijakan:

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subjek	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basisi Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	**11%** untuk deklarasi **8%** untuk asset LN repatriasi dan aset DN **6%** untuk asset LN repatriasi dan aset DN **yang diinvestasikan** dalam SBN/*renewable energy*	**18%** untuk deklarasi **14%** untuk asset LN Reaptriasi dan asset DN **12%** untuk asset LN repatriasi dan asset DN **yang diinvestasikan** dalam SBN/*renewable energy*

Sumber: Kemenkeu

PAJAK KARBON

- Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup
- Pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan:
  - peta jalan pajak karbon; dan/atau
  - peta jalan pasar karbon
- Tarif Pajak Karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan minimal tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
- Pengenaan pajak karbon dilakukan secara bertahap. Tahun 2022 sampai dengan 2024, diterapkan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor PLTU batubara.

Bagaimana dengan PP 73/2019 jo. PP 74/2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM?

Sumber: Kemenkeu

UU CUKAI

1. Penguatan mekanisme penetapan Barang Kena Cukai (BKC): penambahan atau pengurangan jenis BKC disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.
2. Dalam penambahan atau pengurangan BKC atas barang tertentu, Pemerintah akan mempertimbangkan, antara lain:
   a. Kondisi aktual dalam menghadapi pandemi Covid-19
   b. Langkah penanganan dan pemulihan ekonomi
   c. Kebijakan di bidang kesehatan, lingkungan, dan kebijakan lainnya secara berkelanjutan.
3. Menerapkan prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam pelanggaran pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan, pengeluaran BKC, BKC tidak dikemas, BKC yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

Sumber: Kemenkeu

7. Pada tanggal 31 Maret 2022, APLINDO menghadiri FGD Tuntutan Standardisasi dan Produktivitas Bagi Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional di Era Globalisasi, yang diadakan secara virtual.

Standardisasi Industri

BSKJI

UU No.3/2014 Bagian Kedua Standardisasi Industri Pasal 50

(1) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri
(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara
(3) SNI, Spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penerapan SNI dan Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC

SNI → Sukarela → **Dikembangkan sebagai referensi pasar**

ST dan/atau PTC → Wajib → **Diberlakukan wajib untuk**
a. Hasil produksi yang tergolong dalam kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi; dan
b. Barang hasil produksi yang diperdagangkan dalam wilayah NKRI dan/atau jasa industri yang proses kegiatannya dilakukan di wilayah NKRI

Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib ditetapkan oleh Menteri.
(Pasal 10 PP 2/2017 Sarana dan Prasarana Industri)

BSKJI

Standar Bidang Industri

SNI BIDANG INDUSTRI

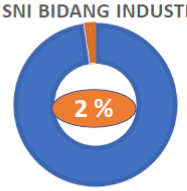

Nomor Pos Tarif

359 HS

	Jumlah SNI	SNI Wajib
Kemenperin	**5 187**	**123**
Non Kemenperin	8 884	178
Total	14 071	301

Jumlah ST dan/atau PTC Bidang Industri

- 2 ST
  - Ubin Keramik (85/M-IND/PER/12/2016)
  - Mainan Anak (24/M-IND/PER/4/2013
- 1 PTC
  - Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (75/M-IND/PER/7/2010)

Penilaian Kesesuaian

Lembaga penilaian kesesuaian

- **Lembaga Sertifikasi Produk** (LSPro)
- **Laboratorium Uji** (SNI ISO/IEC 17025)
- **Lembaga Inspeksi** (SNI ISO/IEC 17020)

PP No.28/2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Untuk menghindari *bottle neck* pada pengujian dan Inspeksi; serta menumbuhkan investasi dalam Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi.

memiliki sendiri: Laboratorium Uji atau Lembaga Inspeksi

JUMLAH LSPRO **53**

1163 RUANG LINGKUP

Berdasarkan hasil evaluasi, **1163 Ruang Lingkup pada 53 LSPro**, sebanyak 513 Ruang Lingkup yang penunjukkan LSPro disertai dengan penunjukkan Lab Uji, sedangkan **650 Ruang Lingkup adalah penunjukkan LSPro tanpa disertai penunjukkan Lab Uji**.

BERITA ATAU ARTIKEL

Gunakan Produk Dalam Negeri untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Saat ini, tantangan ketidakpastian global mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022.

"Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa memacu growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 (persen), BUMN-nya 0,4 (persen)," ucap Presiden.

Presiden menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk dalam negeri. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

"Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barangnya kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan," tutur Kepala Negara.

Kepala Negara menegaskan kementerian/lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar. Presiden menyebut, sebagian besar barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Ini kita ngerti enggak hal-hal seperti ini. Jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita," ucapnya.

Presiden pun menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Selain itu, Presiden meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia.

"Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang Rp400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya," tandas Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (Humas Kemensetneg)

Presiden Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Indonesia

Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, yang digelar di Central Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk menjadikan presidensi G20 sebagai kesempatan untuk menujukkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbondioksida (CO2).

"Melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20 juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik," ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi menilai Indonesia harus mempersiapkan segalanya mulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu mulai dari industri baterai dan komponen lainnya hingga penyiapan SPKLU dan home charging.

"Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah mempersiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200 KW dan 150 titik fasilitas home charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi dalam mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali, pada November mendatang.

"Tadi sudah dilaporkan oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging ini memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan," ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kendaraan listrik merupakan bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak energi fosil yang semakin tinggi harus dihentikan agar kemandirian energi dapat diwujudkan.

"Ketergantungan kita pada BBM pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita, kita tahu semuanya masih impor, membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu kondisi ini tidak boleh kita biarkan kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Sukses Konversi 100 Motor Listrik, Kementerian ESDM Lanjutkan Konversi 1.000 Motor Listrik Tahun 2022

Jakarta, 17/03/2022. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto mengikuti seremoni dan parade konversi sepeda motor BBM ke listrik yang digelar di halaman Kantor Kementerian ESDM bersama dengan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, Arifin Tasrif. Setelah berhasil melaksanakan Program Konversi 100 unit Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melanjutkan konversi tersebut sebanyak 1.000 motor listrik di tahun 2022. Mengoptimalkan konversi 1.000 motor listrik tahun ini dan 13 juta pada tahun 2030 merupakan salah satu strategi Pemerintah mengakselerasi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.

"Kementerian ESDM terus mendorong Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), sebagai bagian dari transisi energi untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, efisien,mengurangi impor BBM, menghemat devisa serta dapat menghemat subsidi BBM. Target kendaraan listrik dalam dokumen Grand Strategi Energi Nasional dan Rancangan Net Zero Emission adalah sekitar 2 juta kendaraan listrik roda empat dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada tahun 2030," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Seremoni Program Konversi Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik di Jakarta, Kamis (17/3).

Apabila target kendaraan listrik tersebut tercapai, menurut Arifin, akan memberikan potensi pengurangan konsumsi BBM sebesar 6 juta KL per tahun dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 7,23 juta ton CO2e. Dalam rangka semakin mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, pada tahun 2022 kami merencanakan program konversi akan ditingkatkan menjadi sebanyak 1.000 unit sepeda motor dengan sasaran sepeda motor operasional BUMN dan Pemerintah Daerah.

Apresiasi juga disampaikan Arifin kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, atas dukungannya dalam pengujian serta penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sepeda motor hasil konversi serta dan juga kepada tim P3TEK EBTKE yang saat ini telah menjadi Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE, atas kerja kerja kerasnya dalam melaksanakan konversi 100 unit sepeda motor dalam waktu 3 bulan, yang hasilnya kita saksikan bersama hari ini.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian RI untuk kemudahan proses perubahan STNK, BPKB dan tanda nomor kendaraan bermotor," pungkas Arifin. (Teks: KLIK-CTA, Grafis: CTA, Red: DE DR)

Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Jadi Juli 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menunda penerapan pajak karbon dari yang semula mulai berlaku 1 April 2022 menjadi bulan Juli 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan, penundaan dilakukan lantaran pemerintah ingin menyiapkan aturan turunan yang konsisten dan baik. Pasalnya, aturan turunan pajak karbon perlu mengharmonisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

"Di tengah kita siapkan aturan ini secara konsisten antara satu dan lain, kita melihat ruang untuk menunda penerapan pajak karbon yang semula 1 april 2022, kita dapat tunda ke sekitar Juli," kata Febrio dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022).

Sembari menyiapkan aturan turunan yang lebih komprehensif, pemerintah saat ini akan fokus memastikan suplai dan permintaan (demand) masyarakat dan daya belinya. Tak bisa dipungkiri, harga-harga komoditas naik menjelang puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. "Fokus pemerintah saat ini untuk memastikan supply dari segala kebutuhan masyarakat dan harga, dan daya beli masyarakat khususnya menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga fokus kebijakan pemerintah bisa semakin memastikan kondisi kesejahteraan dan daya beli masyarakat," sebut dia.

Sebagai informasi, pemerintah sudah menetapkan tarif pajak baru untuk karbon paling rendah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Semula, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tarif pajak karbon Rp 75 per kilogram CO2e. Sebagai tahap awal, pajak karbon dikenakan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.

Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajaknya memperhatikan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Peta jalan pajak karbon terdiri dari strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan dan keselarasan antar berbagai kebijakan lain.

djp
UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Tarif PPN
11%
Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak Pandemi COVID-19
www.pajak.go.id
UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Tarif baru PPN sebesar 11% mulai berlaku
1 April 2022
Tarif PPN secara bertahap menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN, namun pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan paska pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat.

FOUNTERA (Bentonite for Foundry)
Product Review
"Berdasarkan spesifikasinya, bentonite ini bisa menjadi solusi bagi kebutuhan foundry bentonite lokal yang berkualitas"
R. Widodo
Ketua Umum Himpunan Ahli Pengecoran Logam Indonesia (HAPLI)
25KG Keep Dry
Indobent
It's a fine mining
Fountera
Bentonite Foundry
TRUSTED
PROVEN
NATIONAL PRIDE
Selama 10 tahun terakhir, FOUNTERA telah turut serta dalam perjalanan dan kemajuan industri pengecoran logam di tanah air.
Sebagai pionir industri bentonite di Indonesia, INDOBENT dengan bangga mempersembahkan FOUNTERA sebagai salah satu produk unggulan dengan guarantee of supply dan guarantee of quality yang memuaskan.
Indonesia Bentonite
@indonesiabentonite
www.indonesiabentonite.com

Perkembangan Ekspor Impor Indonesia

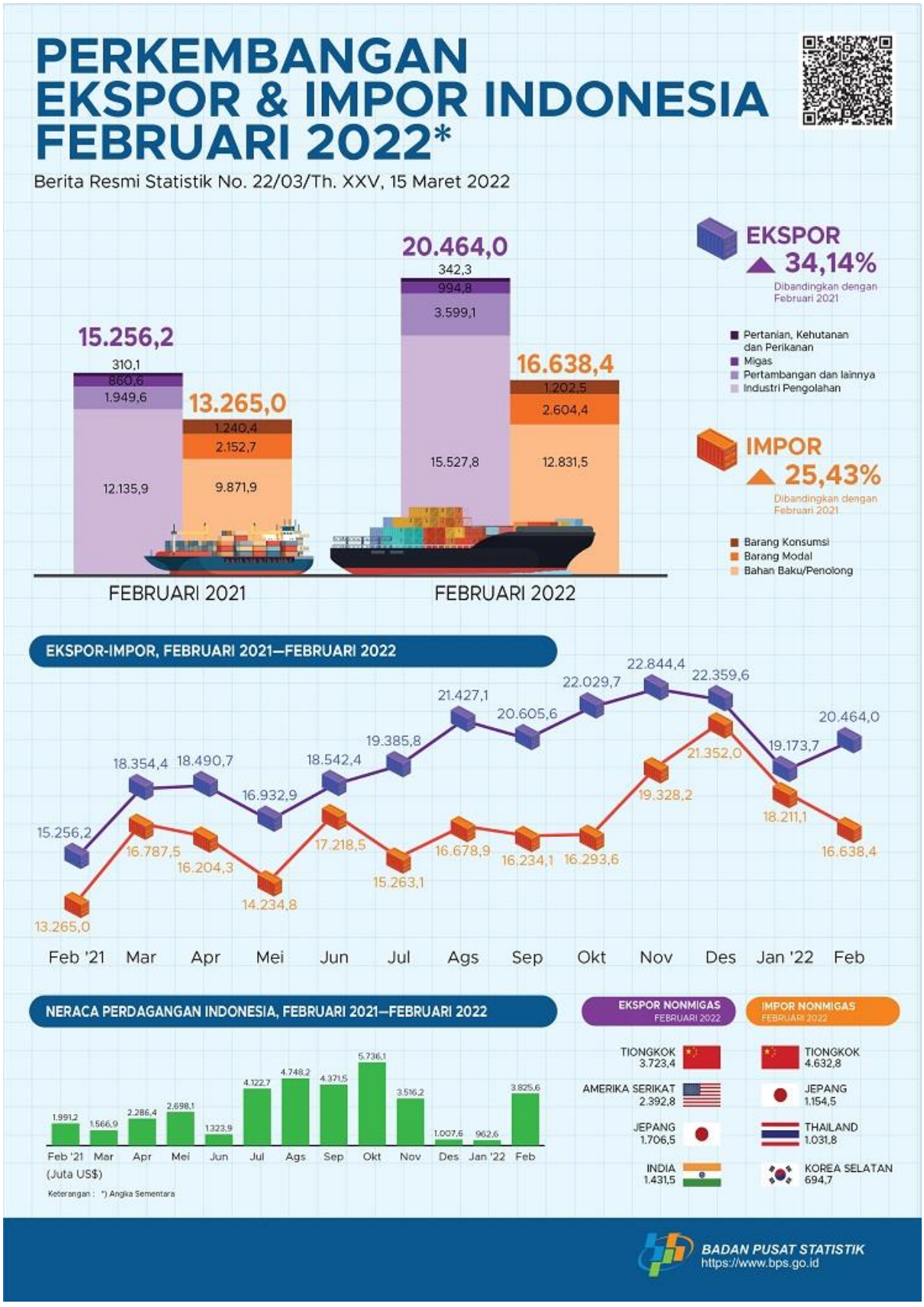

A. Perkembangan Ekspor

- Nilai ekspor Indonesia Februari 2022 mencapai US$20,46 miliar atau naik 6,73 persen dibanding ekspor Januari 2022. Dibanding Februari 2021 nilai ekspor naik sebesar 34,14 persen.
- Ekspor nonmigas Februari 2022 mencapai US$19,47 miliar, naik 6,55 persen dibanding Januari 2022, dan naik 35,24 persen dibanding ekspor nonmigas Februari 2021.
- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Februari 2022 mencapai US$39,64 miliar atau naik 29,75 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$37,74 miliar atau naik 31,02 persen.
- Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Februari 2022 terhadap Januari 2022 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar US$1.756,4 juta (141,45 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada besi dan baja sebesar US$372,9 juta (16, 67 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Februari 2022 naik 29,57 persen dibanding periode yang sama tahun 2021, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 11,45 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 42,84 persen.
- Ekspor nonmigas Februari 2022 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$3,72 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,39 miliar, dan Jepang US$1,71 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 40,18 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$3,68 miliar dan US$1,58 miliar.
- Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Februari 2022 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$6,07 miliar (15,31 persen), diikuti Jawa Timur US$4,14 miliar (10,45 persen), dan Riau US$3,38 miliar (8,52 persen).

B. Perkembangan Impor

- Nilai impor Indonesia Februari 2022 mencapai US$16,64 miliar, turun 8,64 persen dibandingkan Januari 2022 atau naik 25,43 persen dibandingkan Februari 2021.
- Impor migas Februari 2022 senilai US$2,90 miliar, naik 30,19 persen dibandingkan Januari 2022 atau naik 122,52 persen dibandingkan Februari 2021.
- Impor nonmigas Februari 2022 senilai US$13,74 miliar, turun 14,05 persen dibandingkan Januari 2022 atau naik 14,84 persen dibandingkan Februari 2021.
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Februari 2022 dibandingkan Januari 2022 adalah besi dan baja US$368,3 juta (27,13 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah gula dan kembang gula US$117,8 juta (41,21 persen).
- Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Februari 2022 adalah Tiongkok US$10,48 miliar (35,27 persen), Jepang US$2,54 miliar (8,55 persen), dan Thailand US$1,97 miliar (6,62 persen). Impor nonmigas dari ASEAN US$5,31 miliar (17,87 persen) dan Uni Eropa US$1,69 miliar (5,68 persen).
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Februari 2022 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada barang konsumsi US$109,0 juta (4,08 persen), bahan baku/penolong US$6.866,3 juta (34,69 persen), dan barang modal US$1.279,4 juta (31,01 persen).
- Neraca perdagangan Indonesia Februari 2022 mengalami surplus US$3,82 miliar terutama berasal dari sektor nonmigas US$5,73 miliar. Sedangkan di sektor migas terjadi defisit US$1,91 miliar.

CASTING PRODUCTION 2020

In 2020, countries around the world felt the effect of government-mandated work stoppages and restrictions due to the COVID-19 pandemic. Nearly every country surveyed reported a significant drop in production in 2020 compared to 2019. One of the few exceptions was China, which felt the effects of COVID earlier than most, but then rebounded to show a 6% growth overall.

The data reported in the Census of World Casting Production is supplied by each nation's metalcasting association or similar representatives, as well as the World Foundry

Organization and CAEF—The European Foundry Association.

Top 10 Casting Producers:

1. China 51,950,000 metric tons Percent change: 6%
2. India 11,314,360 metric tons Percent change: -1.5%
2. U.S. 9,748,811 metric tons Percent change: -13.7%
3. Russia 4,200,000 metric tons No new data.
4. Germany 3,482,883 metric tons Percent change: -29.6%
5. Japan 3,446,903 metric tons Percent change: -34.7%
6. Mexico 2,855,650 metric tons No new data.
7. Korea 2,380,200 metric tons Percent change: 0%
8. Turkey 2,170,759 metric tons Percent change: -6%
9. Brazil 2,073,173 metric tons Percent change: -9.4%

2020 Casting Production (metric tons)

Country	Gray Iron	Ductile Iron	Malleable Iron	Steel	Copper Base	Aluminum	Magnesium	Zinc	Other Nonferrous	Total
Austria	33,400	91,700[A]		9,600		106,798	4,504			246,002
Belgium	43,000	3,900[A]	-	5,500	-	-	-	-	-	52,400
Brazil	1,148,123	468,952	-	269,512	20,524	160,464	4,534	1,064	-	2,073,173
Canada[B]	330,841	-	-	90,091	14,237	211,374	-	-		646,543
China	21,750,000	15,300,000	630,000	6,350,000	870,000	6,800,000	-	-	250,000	51,950,000
Croatia	19,465	6,161	-	120	202	65,606	-	-	131	91,685
Czech Republic	117,000	34,500[A]	-	41,000	16,000	77,400	300	800	-	287,000
Denmark[C]	28,900	58,100[A]	-	-	1,188	2,224	-	-	112	90,524
Finland	17,300	23,100[A]	-	6,700	2,415	1,730	-	-	-	51,245
France	431,900	593,600[A]	-	41,900	16,118	293,529	-	18,880	2,180	1,398,107
Germany	1,618,700	957,100[A]	-	138,000	46,076	652,738	20,489	49,761	19	3,482,883
Hungary	16,500	58,000[A]	-	2,000	729	118,900	250	1,662	99	198,140
India	7,911,763	1,095,522	50,000	912,893	-	1,344,182	-	-	-	11,314,360
Indonesia	77,783	42,060	86,940	128,724	46,086	182,586	-	-	25,600	589,779
Italy	534,400	300,600[A]	-	58,000	38,168	540,296	3,676	75,834	1,235	1,552,209
Japan	1,598,113	1,169,743	29,439	153,000	57,019	343,651	-	13,792	82,146[G]	3,446,903
Korea (Republic of)	881,400	670,700	-	150,000	24,100	642,200	12,000[D]	-	-	2,380,400
Mexico[E]	816,160	560,270	-	336,250	215,500	832,770	-	79,500	15,200	2,855,650
Norway[C]	8,800	22,300[A]	-	-	-	6,526	-	-		37,626
Pakistan[C]	181,000	24,540	-	48,750	14,200	21,200	-	-	2,730	292,420
Poland	360,000	124,000[A]	-	40,000	4,800	272,000	-	6,000	2,400	809,200
Portugal	26,100	76,100[A]	-	4,100	16,203	31,966	-	2,165	-	156,634
Romania[C]	15,000	1,500	-	3,500	3,000	60,000	2000	250	90	85,340
Russia[C]	2,184,000[F]	-	-	1,134,000	117,600	588,000	75,600	-	100,800	4,200,000
Slovenia	59,300	39,800[A]	-	17,600	990	44,618	-	7,477	-	169,785
South Africa[C]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,000
Spain	283,100	582,800[A]	-	65,300	15,279	101,317	-	7,304	683	1,055,783
Sweden	126,000	51,000[A]	-	20,200	-	56,400	-	-	-	253,600
Switzerland	8,400	11,900[A]	-	2,500	2,023	10,815	-	762	-	36,400
Taiwan (ROC)	543,617	179,697	-	55,007	27,368	481,593	6,237	-	-	1,293,519
Turkey	617,300	854,700[A]	-	192,000	24,851	449,503	761	31,644	-	2,170,759
Ukraine[B]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,000
U.K.	128,400	195,600[A]	-	41,600	8,300	102,522	2,000	7,300	-	485,722
U.S.	7,616,824				304,279	1,425,120		47,786	354,802	9,748,811
WORLD TOTAL	49,532,589	23,597,945	796,379	10,317,847	1,907,255	16,028,028	132,351	352,773	838,227	105,505,602

A) Includes malleable iron B) 2015 data C) 2019 data D) Includes magnesium E) 2017 data F) Includes all ferrous G) Includes aluminum diecasting

DATA KENDARAAN BERMOTOR

1. Data Kendaran Roda 4

a. Penjualan Kendaraan roda 4 tahun 2017-2021 di Indonesia

No.	Bulan	Penjualan (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	86,262	95,885	82,155	80,435	52,909
2	Februari	95,163	94,349	81,809	79,644	49,202
3	Maret	102,335	101,797	90,368	76,811	84,915
4	April	89,588	102,258	84,056	7,868	78,908
5	Mei	93,769	10,052	84,109	3,551	54,812
6	Juni	66,389	58,842	59,600	12,623	72,720
7	Juli	85,354	107,474	89,254	25,285	66,639
8	Agustus	97,256	102,197	90,568	37,277	83,319
9	September	87,696	93,311	93,175	48,554	84,113
10	Oktober	94,433	106,079	96,128	49,018	75,555
11	Nopember	96,191	100,733	91,240	53,834	87,437
12	Desember	85,098	87,846	87,664	57,507	96,673
	Total	1,079,534	1,060,823	1,030,126	532,407	887,202

Sumber :Gaikindo

b. Produksi Kendaraan roda 4 tahun 2017-2022 di Indonesia

No.	Bulan	Produksi (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	98,694	116,653	106,291	112,658	76,319
2	Februari	106,441	100,799	95,104	104,034	77,674
3	Maret	111,344	112,679	113,803	111,320	102,889
4	April	101,923	119,157	104,643	21,432	94,167
5	Mei	105,816	114,699	103,342	2,510	64,101
6	Juni	73,332	70,001	69,213	17,689	99,329
7	Juli	9,559	130,294	119,558	24,413	74,437
8	Agustus	110,315	118,848	119,708	29,584	101,833
9	September	100,009	112,473	120,958	59,573	103,636
10	Oktober	113,678	131,853	122,968	66,378	98,308
11	Nopember	11,295	117,797	112,965	72,386	110,888
12	Desember	86,523	98,461	98,295	68,199	118,386
	Total	1,028,929	1,343,714	1,286,848	690,176	1,121,967

Sumber :Gaikindo

c. Penjualan Kendaraan roda 4 tahun 2016-2020 di ASEAN

No.	Negara	Penjualan (unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Brunai	13.248	11,209	11,226	11,909	12,505
2	Indonesia	1.061.735	1,079,534	1,151,291	1,030,126	532,027
3	Malaysia	580.124	576,625	598,714	604,281	522,573
4	Myanmar	-	8,225	17,524	21,916	17,707
5	Philipina	359.572	425,673	357,410	369,941	223,793
6	Singapura	110.455	116,148	95,243	90,429	56,423
7	Thailand	768.788	871,650	1,041,739	1,007,552	792,146
8	Vietnam	270.820	250,619	288,683	322,322	296,634
	Total	**3.164.742**	**3,339,683**	**3,561,830**	**3,458,476**	**2,453,808**

sumber :AAF

d. Produksi Kendaraan roda 4 tahun 2016-2020 di ASEAN

No.	Negara	Produksi (unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indonesia	1.177.389	1,216,615	1,343,714	1,286,848	690,150
2	Malaysia	545.253	499,639	564,971	571,632	485,186
3	Myanmar	4.000	4,930	12,292	15,496	10,753
4	Philipina	116.868	141,252	79,763	95,094	67,297
5	Thailand	1.944.417	1,988,823	2,167,694	2,013,710	1,427,074
6	Vietnam	236.161	195,937	200,436	176,203	165,568
	Total	4.020.088	4,047,196	4,368,870	4,158,983	2,846,028

sumber :AAF

2. Data Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor

a. Penjualan sepeda motor 2019-2021 Di Indonesia (unit)

Month	2019		2020		2021	
	Domestic	Export	Domestic	Export	Domestic	Export
JAN	569,126	67,016	462,984	62,562	394,733	81,929
FEB	531,824	54,706	545,741	93,659	377,776	79,557
MAR	580,504	60,887	561,739	59,224	521,424	69,243
APR	598,372	52,397	123,782	10,470	472,889	57,306
MAY	561,657	75,956	21,851	5,651	254,710	42,647
JUN	385,136	56,706	167,992	32,884	428,556	71,441
JUL	526,652	71,114	292,205	57,070	376,640	66,105
AUG	596,887	81,497	317,107	74,233	470,065	73,521
SEP	569,493	79,798	380,713	70,981	464,614	67,324
OKT	597,979	82,248	317,830	75,282	444,726	80,327
NOV	547,684	67,858	237,035	78,474	463,586	55,956
DEC	422,146	60,250	231,637	79,902	387,797	58,575
TOTAL	**6,487,460**	**810,433**	**3,660,616**	**700,392**	**5,057,516**	**803,931**

sumber : AISI Diolah

b. Penjualan sepeda motor 2012-2017 di ASEAN

No.	Negara	Penjualan (unit)			
		2017	2018	2019	2020
1	Indonesia	5,886,103	6,383,108	7,297,893	4,363,408
2	Malaysia	434,850	471,842	546,813	498,327
3	Philipina	1,319,085	1,590,333	1,704,900	1,206,374
4	Singapura	9,640	12,053	19,356	10,544
5	Thailand	1,810,771	1,788,323	1,718,587	1,516,096
	Total	9,460,449	10,245,659	3,989,656	7,594,749

sumber :AAF

c. Produksi sepeda motor 2012-2017 Di ASEAN

No.	Negara	Produksi (unit)			
		2017	2018	2019	2020
1	Malaysia	440,673	465,083	553,382	494,490
2	Philipina	1,173,883	1,258,566	1,161,646	631,370
3	Thailand	2,055,193	2,063,076	1,948,480	1,615,319
	Total	3,669,749	3,786,725	3,663,508	2,741,179

sumber :AAF

3. Data Produksi Alat Berat, Kontruksi dan Pertambangan di Indonesia (unit)

No	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Motor Grader	74	81	94	51	18	86
2	Bulldozer	180	375	535	424	79	410
3	Hydraulic Excavator	3.418	5.002	7.109	5.526	3.317	6.133
4	Dump Truck	6	151	243	59	3	111
5	Wheel Loader	0	0	0	0	0	0

Sumber: Hinabi

INFORMASI UMUM

A. Website Pemerintah yang dapat diakses :

1. www.setneg.go.id (Sekretariat Negara)
2. www.kemendagri.go.id (Kementerian Dalam Negeri)
3. www.kemlu.go.id (Kementerian Luar Negeri)
4. www.ekon.go.id (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
5. www.maritim.go.id (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
6. www.kemenperin.go.id (Kementerian Perindustrian)
7. www.kemenkeu.go.id (Kementerian Keuangan)
8. www.kemendag.go.id (Kementerian Perdagangan)
9. www.menlhk.go.id (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
10. www.kemnaker.go.id (Kementerian Ketenagakerjaan)
11. www.bumn.go.id (Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
12. www.beacukai.go.id (Direktorat Bea & Cukai, Kementerian Keuangan)
13. www.esdm.go.id (Kementerian ESDM)
14. www.bkpm.go.id (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
15. www.bps.go.id (Badan Pusat Statistik)

B. Web site Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO)
www.aplindo.web.id

C. Website Himpunan Ahli Pengecoran Logam Indonesia
http://hapli.wordpress.com

PAMERAN DAN SEMINAR

International Metal Technology Indonesia

26-28 Oktober 2022

Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia.

Contact: https://imt-indonesia.com/

Indian Foundry Congress & IFEX 2022

17 – 19 April 2022

Helipad Exhibition Centre, Sector 17, Gandhinagar, Near Ahmedabad Gujarat 382016

Contact: http://www.ifcindia2022.com/

CastExpo 2022 USA

23 – 26 April 2022

Greater Columbus Convention Centre, Columbus, Ohio USA

Contact: https://www.afsinc.org/tradeshows/2615/hotel-transportation

.

World Foundry Summit

9 – 10 Mei 2022

New Yorker Hotel, New York, USA

if you are interested to attend this invite only event, please contact Andrew Turner, General Secretary of the WFO via email Andrew Turner at andrewturner01@btinternet.com

Website: https://www.thewfo.com/events

Subcon Show

7 – 9 Juni 2022

NEC Birmingham UK

Contact: https://www.subconshow.co.uk/

Euroguss 2022

8 – 10 Juni 2022

Exhibition Centre, Nuremberg, Germany

Contact: http://www.euroguss.de/en/exhibition-info

Metef

9 JUNE – 11 JUNE

Metef – International aluminium exhibition

Contact: http://www.metef.com/ENG/Home.asp

Castforge 2022

21 – 23 Juni 2022

Messe Stuttgart, Germany

Contact: http://www.messe-stuttgart.de/castforge/en/visitors/

Litmash Russia 2022

22 – 23 Juni 2022

Venue: Expocentre, Moscow, Russia

Contact: http://www.litmash-russia.com/

62nd International Foundry Conference – Portoroz

14 – 16 September 2022

Venue: Portoroz, Slovenia

Contact: http://www.drustvo-livarjev.si/home

GIFA 1st International Foundry Fair & Forum Southeast Asia

5 – 7 Oktober 2022

Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) Bangkok Thailand

Contact: http://www.gifa-southeastasia.com/show-info

Ankiros/Turkcast

6 OCTOBER – 8 OCTOBER

Tuyap Fair and Convention Centre, Istanbul, Turkey

Contact: https://ankiros.com/home-new/

The 74th World Foundry Congress

16 – 20 Oktober 2022

Bexco,Busan, Korea

Contact: http://www.74wfc.com/

PENUTUP

Kami menghimbau kepada anggota APLINDO agar dapat berpartisipasi dalam mengisi buletin ini berupa tulisan atau artikel, data maupun informasi lain yang berhubungan dengan industri pengecoran logam. Naskah tulisan atau artikel dapat dikirim melalui email atau WhatsApp ke sekretariat APLINDO. Buletin ini juga di upload dalam website APLINDO.

Sekretariat APLINDO

15 April 2022